

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mempunyai peran penting dan signifikan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dalam menyediakan lapangan kerja, hal ini bisa dilihat dari tindakan pemerintah mendukung pelaksanaan UMKM di Indonesia. berdasarkan data Departemen Keuangan pada tahun 2010, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UMKM hingga 56% serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97% menjadi sektor UMKM, dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Selain berperan dalam penerapan tenaga kerja, UMKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besar kemajuan perekonomian bangsa ditopang oleh sektor UMKM yang membuat pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia memberikan perhatian khusus dalam berbagai kebijakannya dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia.

Dari semua kelebihan UMKM yang dapat menopang perekonomian, UMKM memiliki hambatan dalam perkembangannya. Salah satu hambatan UMKM adalah pada sistem akuntansi yang belum memadai. sehingga para pengusaha UMKM hanya sedikit dapat mempertanggungjawabkan kondisi

laporan keuangan dalam kegiatan operasionalnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dalam perlakuan akuntansi terhadap barang persediaan yang dimiliki oleh UMKM. Kebanyakan dari UMKM hanya mencatat jumlah barang yang dibeli dan dijual, namun pencatatan itu hanya sebatas pengingat saja. Meskipun tidak dipungkiri mereka dapat mengetahui jumlah persediaan pada akhir tahun yang hampir sama jumlahnya jika kita mencatat dengan sistem akuntansi.

oleh sebab itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat suatu sistem akuntansi yang dikhususkan untuk dalam kegiatan UMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang disahkan pada tanggal 19 Mei 2009 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan mulai diberlakukan efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Namun, penerapannya SAK ETAP belum terlaksanakan dengan baik.

SAK ETAP dimaksudkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, maksudnya entitas yang tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit maupun masyarakat.

Dalam SAK ETAP bab 11 yang menjelaskan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk atau bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Persediaan Berdasarkan SAK ETAP BAB 11 Pada CV. Mugi Jaya**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi atas persediaan yang dilakukan oleh CV. Mugi Jaya?
2. Apakah perlakuan akuntansi atas persediaan yang dilakukan oleh CV. Mugi Jaya telah sesuai dengan SAK ETAP?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulisan :
 - a. Mengetahui perlakuan akuntansi atas persediaan yang dilakukan oleh CV. Mugi Jaya.
 - b. Mengetahui apakah CV. Mugi Jaya telah melakukan penerapan Akuntansi sesuai dengan SAK ETAP.

2. Manfaat penulisan :

Penulis berharap dari penelitian ini ada manfaat yang dapat diambil oleh semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Analisis yang didapat atas penelitian ini, bisa menjadi pedoman dalam penerapan perlakuan akuntansi atas persediaan barang dagang yang sesuai dengan SAK ETAP bab 11 untuk semua pelaku usaha tanpa akuntabilitas publik.
- b. Bermanfaat bagi CV. Mugi Jaya pada khususnya dan sektor UMKM yang ada di Indonesia pada umumnya. Sebagai pedoman perlakuan akuntansi persediaan dalam menentukan harga pokok penjualan dan menghasilkan laporan keuangan yang baik.
- c. Alat informasi kepada masyarakat yang ingin menjalankan usaha UMKM, untuk mengetahui perlakuan akuntansi persediaan bagi UMKM yang sesuai dengan SAK ETAP.
- d. Syarat dalam menyelesaikan pendidikan diprogram Diploma III Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN METODOLOGI PENULISAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian persediaan

a. Definisi persediaan menurut para ahli

Persediaan merupakan Suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk menjual dalam satu periode usaha yang normal, termasuk barang dalam pergerjaan proses produksi menunggu masa penggunaannya pada proses produksi (Prasetyo, 2006:65).

Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, bahan dalam proses yang dimiliki perusahaan dagang dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut". Kesimpulannya adalah bahwa persediaan merupakan suatu istilah yang menunjukkan segala sesuatu dari sumber daya yang ada dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi baik karena adanya permintaan maupun ada masalah lain (Rudianto, 2008:236).

Pengertian persediaan barang secara umum istilah persediaan barang dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan memproduksi barang-barang yang akan dijual (Zaki Baridwan, 2000:149).